



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

LAPORAN SINGKAT

KOMISI IX DPR RI

**(KEMENTERIAN KESEHATAN, KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI,
BADAN POM, BKKBN, PT. ASKES, PT. JAMSOSTEK, DJSN DAN BNP2TKI)**

Tahun Sidang : 2011-2012
Masa Persidangan : II
Rapat ke : --
Jenis Rapat : Rapat Dengar Pendapat
Dengan : Kepala BNP2TKI
Sifat Rapat : Terbuka
Hari/tanggal : Senin, 28 November 2011
Pukul : Pukul 14.00 WIB – selesai
Acara : 1. Penanganan kasus-kasus TKI yang terancam hukuman mati di luar negeri;
2. Kesiapan BNP2TKI terkait dengan pencabutan moratorium pengiriman TKI ke Luar Negeri;
3. Penjelasan BNP2TKI terkait dengan pemulangan jenazah TKI ke Indonesia;
4. Membahas implementasi kebijakan BNP2TKI mengenai Pembekalan Akhir Pemberangkatan (PAP).
Ketua Rapat : Ir. Soepriyatno/Wakil Ketua Komisi IX DPR RI
Sekretaris Rapat : Dra. Tri Udiartiningrum / Kabag Sekretariat Komisi IX DPR RI
Tempat : Ruang Rapat Komisi IX DPR RI, Gedung Nusantara I Lantai 1
Jln. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Pusat
Jumlah Kehadiran : 38 orang anggota dari 48 Anggota, 2 orang izin

I. PENDAHULUAN

Rapat Dengar Pendapat Komisi IX DPR RI dengan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) dibuka pukul 14.35 WIB, setelah kuorum terpenuhi sebagaimana Peraturan Tata Tertib pasal 245 ayat (1) dan dinyatakan *terbuka* untuk umum.

II. KESIMPULAN

1. Komisi IX DPR RI meminta BNP2TKI untuk terus memperbaiki data kasus-kasus TKI yang terancam hukuman mati di luar negeri dan penanganannya agar tidak terjadi kesimpangsiuran.
2. Komisi IX DPR RI meminta BNP2TKI untuk segera berkoordinasi dengan KBRI di negara penempatan dan pemerintah negara tujuan untuk segera memulangkan jenazah TKI kembali ke Indonesia.
3. Komisi IX DPR RI mendorong BNP2TKI untuk lebih meningkatkan upaya perlindungan TKI di luar negeri melalui kegiatan Pembekalan Akhir Pemberangkatan (PAP) yang lebih optimal.
4. Komisi IX DPR RI mendorong BNP2TKI untuk tetap menghentikan sementara penempatan TKI khusus TKI PLRT ke Arab Saudi sebelum ada MoU antara Pemerintah Indonesia dengan pemerintah Saudi Arabia.
5. Komisi IX DPR RI meminta BNP2TKI untuk melakukan pembelaan terhadap TKI yang terancam hukuman mati dengan memberikan bantuan hukum sejak awal sehingga dapat meringankan hukuman daripada penyelesaian dengan pembayaran diyat.
6. Terkait rencana pencabutan penghentian sementara (moratorium) khususnya TKI PLRT ke Malaysia pada bulan Desember 2011, Komisi IX DPR RI meminta BNP2TKI untuk menerapkan "*reward and punishment*" terhadap PPTKIS yang berhasil dan lalai dalam proses penempatan TKI di luar negeri.
7. Komisi IX DPR RI meminta hasil kajian BNP2TKI tentang penempatan TKI di negara Sudan dan laporan hasil Rakornis yang dilaksanakan di Dubai pada tanggal 20-24 Nopember 2011, paling lambat tanggal 5 Desember 2011.

Rapat diakhiri pukul 17.15 WIB.

Jakarta, 28 Nopember 2011
PIMPINAN KOMISI IX DPR RI
Wakil Ketua,



Ir. SOEPRİYATNO